

Mekanisme Pemisahan Tempat Duduk Pria dan Wanita di Angkot DKI

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal mengatur tempat duduk antara penumpang perempuan dan pria di angkutan kota (angkot). Aturan ini buntut kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah angkot beberapa waktu lalu.

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan mekanisme pemisahan itu. Nantinya, penumpang perempuan akan diarahkan duduk di baris sebelah kiri angkot yang umumnya tersedia empat bangku. Sementara untuk penumpang laki-laki akan duduk di sisi seberangan yang berkapasitas enam orang.

Syafrin mengatakan pihaknya akan menerbitkan petunjuk pelaksana (juklak) terkait kebijakan pemisahan itu pada pekan ini.

"Nantinya dalam juklak akan mengarahkan seluruh operator mikrotrans maupun angkot untuk penumpang yang wanita diprioritaskan duduk di sisi sebelah kiri, sementara yang pria akan diarahkan untuk duduk di sisi sebelah kanan. Sehingga akan ada pemisahan secara fisik, tidak lagi bercampur," kata Syafrin.

Dengan kebijakan itu, ia berharap pengemudi angkot mudah mengawasi gerak-gerik penumpang di dalam angkot.

Ia menyebut kebijakan pemisahan itu diambil karena angkot tidak mungkin menerapkan koridor khusus perempuan seperti di bus Transjakarta.

"Kalau di dalam layanan Transjakarta, medium bus, penumpang pria dipisahkan. Demikian pula di bus Transjakarta. Ini di angkot tentu untuk memisahkan yang perempuan di depan, yang laki di belakang itu tidak mungkin, karena memang kapasitas angkotnya itu sendiri," tutur Syafrin.

Syafrin menyatakan kebijakan ini akan berlaku untuk seluruh angkot di Jakarta. Saat ini ada sekitar 6.000 angkot di Jakarta, 2.100 di antaranya sudah terintegrasi dengan sistem Jaklingko, sementara 4.000 lainnya belum.

"Seluruh angkot mulai minggu ini. Surat juklak (petunjuk pelaksana) sedang disusun, setelah juklaknya terbit kita akan sosialisasikan kepada operator dan jajarannya untuk melakukan penerapan," jelas Syafrin. ● yan

Tarif Integrasi JakLingko Rp10 Ribu, Berlaku Agustus

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tarif integrasi bagi pengguna layanan MRT, LRT dan Transjakarta. Nantinya dengan menggunakan tarif integrasi JakLingko dengan besaran Rp10 ribu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan terkait paket tarif integrasi JakLingko saat ini masih dalam proses penyusunan Keputusan Gubernur (Kepgub). Menurutnya sedang dilakukan finalisasi integrasi tiga moda transportasi di Jakarta.

"Saat ini untuk tarif integrasi, paket tarif integrasi Jaklingko sedang dalam proses penyusunan keputusan gubernur. Dan paralel dengan itu juga sedang difinalisasi integrasi di tiga moda: LRT,

MRT, dan Trans Jakarta," kata Syafrin, Selasa (12/7).

"Sehingga harapannya nanti setelah keseluruhannya siap akan dilakukan uji coba. Dan setelah uji coba, tentu akan dilakukan peluncuran," imbuhnya.

Syafrin menargetkan penetapan Kepgub tuntas pada Juli 2022. Sedangkan, sistem tarif integrasi JakLingko akan diluncurkan Agustus 2022 mendatang agar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Tentu penetapannya kami targetkan di bulan ini tuntas. Karena itu ada proses verbal. Dan setelah itu kita harapkan di Bulan Agustus sudah bisa diluncurkan, dan bisa dirasakan oleh masyarakat manfaat dari paket tarif integrasi Jaklingko," tuturnya.

● yan



FOTO: ANI

AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PANGAN MURAH BERKUALITAS

Petugas melayani warga yang membeli bahan pangan bersubsidi di RPTRA Mahkota, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (12/7). Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bagi pemegang KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, buruh ber-KTP DKI, dan guru non-PNS setiap bulannya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan murah berkualitas seperti beras, susu, daging, ikan kembung dan telur ayam.

Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Bisa Kena Denda Pajak

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan ketentuan pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Desember 2022.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Asep Kuswanto menyebut pemilik kendaraan dengan usia lebih dari 3 tahun, akan membayar pajak kendaraan wajib untuk memenuhi baku mutu uji emisi. "Jika tidak lulus uji emisi dan/atau belum melakukan uji emisi, dikenakan denda pajak.

Koefisien dendanya saat ini sedang dibahas oleh Kementerian LHK, Kemendagri dan Kemenkeu," ujar Asep dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Asep kembali menegaskan bahwa implementasi kebijakan itu dipastikan berlangsung akhir tahun ini. "Kita sedang memformulasikannya bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup, Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan,"

imbuhnya. Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 206 Ayat 2 (a) yang mengatur bahwa pemenuhan uji emisi diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 531 poin f bahwa pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk unsur pencemar lingkungan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Memperkerat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi, merupakan salah satu poin dalam Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Diketahui, sumber polusi terbesar di Jakarta bersumber dari sektor bergerak, yaitu kendaraan bermotor atau transportasi darat. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



MENTERI PUPR TINJAU TMII

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) berjalan saat meninjau tugu api di TMII, Jakarta, Selasa (12/7). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat langsung progress revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dipersiapkan untuk KTT G20.

Ikan-ikan di Kali Kramat Jati Mati Diduga Akibat Limbah Jeroan Kurban

Petugas DLH DKI Jakarta sudah mengambil sampel air Kali Baru tersebut. Sampel itu akan diuji di laboratorium daerah milik DLH. Uji laboratorium akan berjalan sekitar 12 hari. Dari hasil lab tersebut bisa diketahui sumbernya dari mana.

JAKARTA (IM) - Ikan-ikan mati di Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur, disebut akibat keracunan limbah jeroan hewan kurban. Namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tak ingin cepat memberi kesimpulan. "Itu juga belum dapat kita simpulkan karena kita belum mendapat hasil labnya," kata Sub Koordinator Urusan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat DLH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, Selasa (12/7).

Dia mengatakan petugas DLH DKI Jakarta sudah mengambil sampel air Kali Baru tersebut. Sampel itu akan diuji di laboratorium daerah milik DLH.

Dia mengatakan uji laboratorium akan berjalan sekitar 12 hari. Penyebab matinya ikan-ikan tersebut akan didasarkan pada hasil uji laboratorium sampel air Kali Baru.

"Nanti dari hasil lab tersebut kita bisa tahu sumbernya dari mana. Jadi sampai saat ini

kita belum dapat pastikan itu disebabkan oleh jeroan hewan kurban dan lain sebagainya," ujar dia.

Yogi juga menjelaskan soal kabar kasus ikan-ikan di Kali Baru pernah mati massal tak jauh dari hari raya Idul Adha. Dia mengatakan peristiwa serupa belum pernah terjadi.

"Untuk Idul Adha sebelumnya, ini belum pernah terjadi, kami baru dapat laporan ini kemarin pada Senin, bertepatan sehari setelah Idul Adha. Sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi laporan seperti ini yang bersamaan dengan pelaksanaan Idul Kurban," kata dia.

Yogi mengatakan ikan sapu-sapu efektif untuk membersihkan perairan karena ikut mendekomposisi perairan. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dapat hidup di perairan dengan

kandungan oksigen rendah.

Matinya ikan sapu-sapu ini mengindikasikan air di Kali Baru tercemar. Namun dia mengatakan DLH masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab kematian massal ikan tersebut.

"Ketika mati, apakah itu indikasi pencemaran? Ya, itu salah satu indikasi pencemaran karena yang salah satu kita ukur juga BOD atau kandungan oksigen di dalam perairan

tersebut," ucapnya.

"Ikan sapu-sapu ini termasuk ikan yang tahan untuk kadar oksigen rendah. Ketika ikan sapu-sapu ini mati, bisa dipastikan kadar oksigennya rendah sekali sehingga memang bisa dipastikan terjadi pencemaran. Namun itu perlu kita uji di laboratorium. Kita juga melakukan pengujian sampel air tersebut untuk parameter BOD atau kandungan oksigen dalam air tersebut," tambah Yogi. ● yan

CEGAH HEPATITIS AKUT

Suku Dinas Kesehatan Imbau Warga Jakbar Perhatikan Kebersihan Makanan

JAKARTA (IM) - Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Arum Ambar Sari mengingatkan masyarakat untuk waspada risiko hepatitis akut. Arum meminta warga mengonsumsi makanan dan minuman yang telah dimasak secara sempurna.

"Biasakan hidup bersih dan sehat (HBS), seperti makan makanan yang sudah dimasak, matang sempurna," kata Arum di Jakarta, Selasa (12/7).

Kebersihan lingkungan di sekitar rumah juga dapat mempengaruhi penyebaran penyakit hepatitis akut. Jika ada warga yang menun-

jukan gejala hepatitis akut, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat meminta warga langsung ke dokter atau rumah sakit. Kecepatan penanganan pasien hepatitis akut juga sangat penting, karena ada satu kasus pasien meninggal akibat hepatitis akut di Jakbar beberapa waktu lalu akibat terlambat ditangani.

"Karena satu kasus kematian di Jakarta Barat itu karena pasien tidak dibawa ke rumah sakit dengan cepat," ujarnya.

Berdasarkan data pada 31 Mei lalu, tercatat ada 8 orang diduga yang terjangkit hepatitis akut. "Total di DKI ada 45," kata Arum. Satu di antaranya meninggal. ● yan

DPRD DKI Dorong Kejelasan Pemanfaatan Helipad

JAKARTA (IM) - Komisi A DPRD DKI Jakarta menyayangkan regulasi yang jelas dari pemanfaatan pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu. Termasuk kejelasan izin keberadaan landasan helikopter atau helipad di Pulau Panjang, Kabupaten Kepulauan Seribu.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, kejelasan perizinan harus ada dalam konteks pemanfaatan aset milik negara. Termasuk perubahan peruntukan suatu aset. "Boleh ada perubahan tapi harus jelas. Jangan sampai (mengatakan) memperbaiki ini, itu yang akhirnya mereka bilang paling baik," kata Mujiyono pada Selasa (12/7).

Anggota Komisi A, Bambang Kusumanto menyayangkan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan landasan helikopter tersebut. Dia mengkhawatirkan bila tidak ada peraturan yang jelas, maka tidak ada yang bertanggung jawab atas aset itu.

"Itu milik Pemda dan banyak yang pakai sebaiknya dibuat suatu peraturan. Minimal pakai Pergub ya, bahwa (helikopter) yang mendarat di situ ada retribusi untuk biaya perawatan dan bisa menjadi penerimaan pendapatan asli daerah," ujar Bambang. Bambang menuturkan, apabila Pemprov DKI berniat membuat landasan helikopter, maka sebaiknya melalui kajian yang matang untuk memenuhi standar teknis tempat pendaratan dan lepas landas helikopter dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan.

"Saya rasa sebenarnya bagus ada helipad, tapi harus dibuat yang memenuhi standar. Kemudian kita buat aturan dan sosialisasi agar masyarakat

umum mengetahui ada fasilitas untuk mendarat," tuturnya.

Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mengakui hingga saat ini memang belum ada peraturan untuk memungut retribusi pada pemilik helikopter yang mendarat di landasan tersebut. "Kami laporkan di sana tidak ada pungutan biaya terhadap helikopter yang akan mendarat," kata Junaedi.

Junaedi menjelaskan, landasan helikopter tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan sektor wisata. Pasalnya di Pulau Panjang masyarakat bisa berwisata rekreasi ke makam Sultan Maulana Mahmud Zakaria.

"Sebenarnya lebih murah kalau dibanding sewa kapal boat, kalau heli itu Rp6-7 juta buat enam orang. Kalau boat kan bisa lebih dari itu. Ketika ada cuaca yang tidak bersahabat seperti ombak, cuaca ekstrem, bisa menggunakan helikopter," pungkasnya. ● yan



FOTO: ANI

PENANAMAN 2.000 BIBIT MANGROVE

Dua orang pegawai menanam bibit mangrove di pesisir wilayah Pantai Utara Power Generation and O&M Services Unit (POMU), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (12/7). Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) bersama PT Indonesia Power menanam sebanyak 2.000 bibit mangrove yang ditanam pada area sekitar satu hektar tersebut bertujuan untuk menjaga ekosistem pantai serta laut guna mengurangi dampak abrasi pantai.

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan adanya rencana pengalihan hak atas saham pada PT. RAPID SEJATI MANDIRI ("Perseroan") yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada alamat sebagaimana tertera dibawah ini.

Jakarta, 13 Juli 2022

Direksi

PT. RAPID SEJATI MANDIRI

Jl. Pejajalan I No 3/1,

Pekojan Tambora - Jakarta Barat